



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS HERMAWAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL**
3. NHK : **67259**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.594.145.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/80 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 372.650.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 156.840.000
3. Tanah Seluas 1045 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 28.215.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/214 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 892.294.000
5. Tanah Seluas 1833 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 65.988.000
6. Tanah Seluas 541 m2 di KAB / KOTA GARUT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 19.476.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/70 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 58.682.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 3.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 360.253.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 700.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.020.763.858

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.678.161.858



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.678.161.858

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.